

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU JAWA TAHUN 2011 - 2015

THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURES, GOVERNMENT INVESTMENTS, PRIVATE INVESTMENT AND LABORS TO ECONOMIC GROWTH IN JAVA ISLAND (CASE STUDY 2011 – 2015)

Aria Langlang Buana¹, Herlina Juni Risma Saragih², Sovian Aritonang³

Universitas Pertahanan
(arialanglang@yahoo.com)

Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah, investasi swasta dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi yang terdapat di pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PDRB yang diperoleh dari BPS, pengeluaran pemerintah yang diukur dari belanja daerah yang diperoleh dari perhitungan APBD, investasi pemerintah berupa penyertaan modal daerah yang diperoleh dari perhitungan APBD, investasi swasta berupa kredit perbankan masing-masing provinsi yang diperoleh dari Kajian Ekonomi Regional yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengujian model penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa. Pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 97% dan sisanya sebesar 3% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan korelasi seluruh variabel independen dengan variabel dependennya menunjukkan korelasi yang tinggi yaitu sebesar 0,989.

Kata Kunci: pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah, investasi swasta, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi

Abstract - The purpose of this study is to examine whether there is influence of government spending, government investment, private investment and labor on economic growth in Java. Target population in this study are all provinces in Java Island, namely DKI Jakarta, Banten, West Java, Central Java, East Java and Yogyakarta Special Region. The data used in this study are PDRB obtained from BPS, government expenditure measured from regional expenditure obtained from the calculation of APBD, government investment in the form of local capital participation obtained from the calculation of APBD, private investment in the form of credit banking each province obtained from Regional Economic Review published by Bank Indonesia with observation period of 2011-2015. This research uses quantitative method and research model test using multiple linear regression analysis. The result of hypothesis testing shows that government expenditure, private investment and labor have positive effect to economic growth in Java Island. The effect of all independent variables on the dependent variable is 97% and the remaining 3% is the influence of other variables

¹ Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pertahanan

² Dosen Program Studi Manajemen Pertahanan

³ Dosen Program Studi Industri Pertahanan

that are not examined in this study. While the correlation of all independent variables with the dependent variable shows a high correlation of 0.989.

Keywords: government expenditure, government investment, private investment, labor, economic growth

Pendahuluan

Proses perjalanan pembangunan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan yang signifikan, mulai dari pemerintahan Orde Lama, Orde baru, Orde Reformasi hingga Pasca Reformasi. Setiap tahapan diperlukan perencanaan yang matang agar arah pembangunan dapat berhasil. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya⁴.

Dalam hal pembangunan perekonomian, peranan pemerintah dapat dikaji dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional (APBN) di tingkat pemerintah pusat dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat pemerintah daerah. Pentingnya pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2015) adalah menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang akan

diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Struktur APBN dan APBD menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terbagi atas sisi penerimaan dan pengeluaran. Besarnya penerimaan dipengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) dan alokasi dana dari pemerintah pusat yang besar kecilnya sangat bervariasi. Alokasi dana pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah berjalan melalui mekanisme dana perimbangan (termasuk disini adalah transfer pemerintah pusat kepada daerah). Oleh karena itu peran Pemerintah Pusat di satu sisi masih sangat menentukan bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*). Pemerintah wajib ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum. Harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian yaitu pemerintah. Teori Keynes mengancam kebijakan pemerintah yang terlalu

⁴ Erman Rustiadi dkk, *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011)

mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Pemerintah juga harus mendorong konsumsi lewat instrument pengeluaran pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi⁵.

Instrumen penting lain untuk menggerakkan perekonomian adalah investasi. Menurut Jogiyanto (2010) investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Menurut Sukirno (2015) investasi pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia selalu menarik minat investor asing untuk berinvestasi. Selain jumlah penduduk yang tinggi, kekayaan sumber daya alam seperti tambang, hutan, dan laut menjadi incaran investor. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 250.000.000 jiwa merupakan pasar yang besar bagi

investor. Terbukti dalam 10 tahun terakhir, perekonomian Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,6% per tahun di tengah gejolak ekonomi global yang kurang bersahabat.

Investasi Pemerintah daerah meliputi kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunaan / pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Investasi Swasta diperlukan karena dalam melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan biaya yang cukup besar yang salah satunya diperoleh dari investasi swasta baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri⁶. PMA sebagai salah satu

⁵ Paul Samuelson and William D Nordhaus, *Economics*, (USA : Mc Graw Hill, 2010), hlm. 78.

⁶ Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta : BPFE UGM, 2010), hlm. 45.

jenis penanaman modal yang memiliki peran sangat besar dalam pembangunan. Modal ini masuk dalam bentuk investasi langsung yang dapat berupa pendirian pabrik guna menyerap tenaga kerja maupun investasi tidak langsung yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Bentuk investasi swasta berikutnya adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN). PMDN sebagai sumber domestik merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di negara tersebut. Investasi di sektor barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi tenaga kerja. Tinggi rendahnya kualitas tenaga kerja dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi sumberdaya manusia yang terlibat dalam dunia kerja atau tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi⁷. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi, akan

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah, sehingga akan memberi dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Pembangunan Indonesia selama ini lebih menitik beratkan di pulau Jawa. Padahal luas pulau Jawa hanyalah nomor lima dari pulau terbesar di Indonesia. Hampir 60% penduduk Indonesia mendiami pulau Jawa atau sekitar 160.300.000 jiwa. Pulau Jawa pada akhirnya menjadi barometer pembangunan Indonesia. Selain terdapat Ibukota Negara, pusat bisnis, pusat perdagangan, pusat pendidikan juga menjadi pusat pertahanan negara. Obyek penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Jawa mengingat posisi strategis yang dimiliki

Data tahun 2015 pulau Jawa terdiri dari 6 Provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur). DKI Jakarta selaku Ibukota Negara memiliki luas sebesar 661,5 km² dengan jumlah penduduk sebesar 10.187.595 jiwa. DKI Jakarta terbagi dalam lima kota Administratif yaitu : Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan⁸.

⁷ Barry Cushway, *Human Resources Management*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 64.

⁸ Badan Pusat Statistik, 2015

Banten adalah provinsi termuda di pulau Jawa. Dengan luas 9.160 km², Banten didiami 10.632.166 jiwa. Banten terdiri dari empat kabupaten (Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang) dan empat kota (Cilegon, Serang, Tangerang, Tangerang Selatan)⁹.

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan luas 37.174 km² dan didiami 46.710.000 jiwa terdiri dari delapan belas kabupaten (Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya) dan Sembilan kota (Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya)¹⁰.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi dengan luas 3.185,52 km² dan jumlah penduduk sebesar 3.657.700 jiwa, terdiri dari empat kabupaten (Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul) dan satu kota (Yogyakarta)¹¹.

Jawa Tengah adalah Provinsi di pulau Jawa dengan luas sebesar 32.801 km² dan didiami 33.750.000 jiwa dengan

jumlah kabupaten sebanyak dua puluh sembilan (BanjarNEGARA, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo) dan enam kota (Magelang, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Surakarta, Tegal)¹².

Jawa Timur adalah provinsi paling Timur di Jawa. Dengan luas sebesar 42.800 km², Jawa Timur didiami 38.850.000 jiwa. Jawa timur terdiri dari 29 kabupaten (Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung) dan sembilan kota (Batu, Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya)¹³.

Pulau Jawa secara umum pertumbuhan ekonominya tumbuh sekitar 6 % selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu pada periode tahun 2011-

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

2015¹⁴. Dari sisi penerimaan, masih terjadi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat yang ditandai dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan secara simultan, agar dapat menyejahterakan masyarakat. Kebijakan yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam hal alokasi anggaran, agar dapat merangsang terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) harus didorong agar merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga berpengaruh pada tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di Indonesia senantiasa naik setiap tahunnya, dengan porsi terbesar bekerja sebagai pegawai/karyawan sebesar 35%. Tenaga kerja yang berusaha sendiri rata-rata sebesar 18%. Sedang porsi tenaga kerja yang bekerja serabutan/ tidak tetap hampir sama dengan tenaga kerja yang berusaha sendiri, yaitu sebesar 17%¹⁵. Pemerintah

wajib menyediakan lapangan kerja di seluruh daerah agar terjadi pemerataan.

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur pemerataan ekonomi adalah dengan *gini ratio*.

Tabel 1. Rasio Gini Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2011-2015¹⁶

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
DKI Jakarta	0,42	0,43	0,42	0,43	0,43
Banten	0,40	0,42	0,42	0,41	0,42
Jawa Barat	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38
Jawa Tengah	0,41	0,43	0,45	0,43	0,43
Jawa Timur	0,36	0,36	0,36	0,39	0,41
DI Yogyakarta	0,40	0,39	0,39	0,41	0,39
Nasional	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Dari Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa relatif terjaga pertumbuhannya namun *gini ratio* relatif stagnan, dengan tingkat ketimpangan sedang. Bahkan di provinsi DKI Jakarta dan Banten koefisien *gini ratio* di atas rata-rata nasional. Ini artinya pemerataan hasil pembangunan belum merata. Dirasakan masyarakat banyak.

Pemerintah Daerah harus bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya bergantung pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) tapi juga mengoptimalkan tumbuhnya investasi dan tenaga kerja

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

untuk meningkatkan pembangunan dan mencegah masuknya potensi disintegrasi bangsa dan membentengi tumbuhnya paham radikal di tengah masyarakat.

Berkaca dari fenomena yang terjadi di atas, di mana pertumbuhan ekonomi relatif stabil tumbuh rata-rata sebesar 5% per tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir tetapi indeks gini menunjukkan terjadi ketimpangan (kategori sedang) juga selama kurun waktu lima tahun terakhir, maka penelitian ini mencoba untuk menganalisis besarnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi di pulau Jawa dengan melihat keterkaitan antara Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja. Pulau Jawa menjadi fokus penelitian karena 60% penduduk Indonesia menetap di pulau Jawa. Selain itu, pulau Jawa juga merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan sekaligus pusat pertahanan Negara. Obyek penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di pulau Jawa.

Dalam konteks Ekonomi Pertahanan, hal ini menjadi sangat penting. Ekonomi Pertahanan adalah ilmu

yang menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi terhadap aspek pertahanan dan isu-isu yang terkait dengan pertahanan¹⁷. Ekonomi Pertahanan mencermati berbagai isu pertahanan negara secara luas, termasuk di dalamnya masalah keamanan negara. Ekonomi pertahanan memiliki konsekuensi ekonomis yang timbul dari variabel tenaga kerja, modal dan biaya lain ditambah sulitnya mengidentifikasi ancaman dibanding dalam kondisi perang, karena ancaman sangat beragam dalam situasi normal¹⁸.

Pemerintah wajib menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa mengabaikan aspek pemerataan distribusi pendapatan karena jika dua hal ini terjaga, diharapkan akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan masyarakat sejahtera, potensi disintegrasi bangsa bisa dicegah. Sebaliknya, jika masyarakat tidak sejahtera dan miskin, akan mudah disusupi paham radikal yang berpotensi merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁷ Todd Sandler dan Keith Hartley, *Handbook of Defense Economics*, (UK: North-Holland, 2008), hlm. 175.

¹⁸ Yusgiantoro Purnomo, *Ekonomi Pertahanan Teori dan Praktek*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm 23.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan variabel terukur (*observable*). Jenis data yang digunakan adalah *panel data* (*pooled data*) yang merupakan gabungan antara data *cross section* dengan *time series*, dimana penelitian ini terdiri dari beberapa objek dan rentang periode waktu 2011-2015. Objek dalam penelitian ini adalah APBD seluruh provinsi di pulau Jawa untuk mengukur investasi pemerintah dan pengeluaran pemerintah daerah, jumlah kredit investasi dan modal kerja yang dikucurkan pihak perbankan untuk mengukur investasi swasta, informasi jumlah tenaga kerja dan PDRB yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di pulau Jawa yang terdiri dari 6 (enam) provinsi. Provinsi-provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu apabila keseluruhan elemen populasi diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri :

- a) Data pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB setiap provinsi selama tahun 2010 – 2015 diperoleh melalui Badan Pusat Statistik.
- b) Data pengeluaran pemerintah diperoleh dari besarnya belanja daerah setiap provinsi selama tahun 2011 – 2015.
- c) Data investasi pemerintah diperoleh dari peraturan daerah/peraturan gubernur tentang APBD setiap provinsi selama tahun 2011 – 2015.
- d) Data investasi swasta diperoleh dari laporan Kajian Ekonomi Regional yang diterbitkan oleh Bank Indonesia setiap provinsi selama tahun 2011 - 2015.
- e) Data jumlah tenaga kerja setiap provinsi selama tahun 2010 – 2015 diperoleh melalui Badan Pusat Statistik.

Setelah didapatkan data dari kuesioner, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dan melaksanakan serangkaian pengujian kelayakan instrumen dan data, diantaranya adalah: 1) Pengujian Asumsi Klasik terhadap data yang didapatkan (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), 2) Pengujian hipotesis (uji t, uji F, dan Koefisien determinasi) 3) Analisis regresi linier berganda.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun¹⁹. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan pendapatan nasional berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan. Jadi perubahan dalam nilai pendapatan hanya semata-mata disebabkan oleh suatu perubahan dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dihitung melalui indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan baik apabila tingkat kegiatan ekonomi masa sekarang lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya.

Konsep-konsep pertumbuhan ekonomi adalah²⁰ :

1. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil. Output riil suatu perekonomian bisa juga tetap konstan atau mengalami penurunan. Perubahan ekonomi meliputi pertumbuhan, statis maupun

penurunan, dimana pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat positif, sedangkan penurunan merupakan perubahan negatif.

2. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan output perkapita dalam hal ini pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output total riil perkapita. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tingkat kenaikan output total riil > daripada tingkat pertambahan penduduk, sebaliknya terjadi penurunan taraf hidup aktual apabila laju kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada laju pertambahan output total riil.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah melalui APBN tercermin dalam realisasi belanja rutin dan belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri disebut penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran

¹⁹ Sadono Sukirno. *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : PT Rajaiafindo Persada, 2015), hlm. 113.

²⁰ *Ibid.*

konsumsi (*current expenditure*), misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain. Pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi dan menyumbang kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja pegawai diharapkan akan menyebabkan kenaikan produksi yang diukur dengan PDB. Kenaikan belanja barang dan jasa juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi nasional dan provinsi. Peningkatan belanja barang dan jasa juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor.

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja

administrasi umum²¹. Belanja modal juga dapat disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan²².

Belanja Modal juga dikategorikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59

²¹ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010), hlm. 91.

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahun 2007²³ ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007²⁴ disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal, kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi yang bersifat tidak rutin.

Indikator pengeluaran pemerintah terdapat pada APBD provinsi. Pengeluaran Pemerintah terdapat dalam pos belanja daerah. Belanja daerah merupakan gabungan dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Investasi pemerintah

Investasi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012²⁵ adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh

pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah
2. Meningkatkan pendapatan daerah
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi pemerintah adalah penggunaan anggaran pemerintah yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menyangkut dimensi waktu yang lebih panjang dari satu tahun anggaran. Investasi pemerintah ditujukan untuk pembentukan aset (stok barang modal / *capital stock*) di masa depan yang diharapkan dapat menimbulkan *multiplier effect* yang besar dan lebih berkelanjutan.²⁶

Investasi merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara²⁷.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

²⁶ Kementerian Keuangan RI, *Better Practice Guide Penganggaran Berbasis Kinerja*. (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014), hlm. 4.

²⁷ A.Y Luntungan, Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerahi*, 2017

dengan bertumbuhnya ekonomi suatu negara maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian dalam menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi. Untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung-gedung perkantoran, mesin-mesin dan alat-alat produksi, lembaga penelitian dan pengembangan, alat-alat transportasi dan komunikasi, dan masih banyak lagi. Untuk pengadaan semua itu maka diperlukan dana untuk membiayainya yang disebut dana investasi.

Indikator Investasi Pemerintah terdapat di APBD Provinsi. Investasi Pemerintah terdapat dalam pos pengeluaran yang berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Investasi Swasta

Dalam konteks makroekonomi, pengertian investasi menurut Dornbusch (2008) adalah pengeluaran yang menambah persediaan barang dan modal. Dengan demikian kegiatan seperti

pembangunan rumah, pembelian mesin atau peralatan, pembangunan pabrik dan kantor, serta penambahan barang persediaan suatu perusahaan termasuk dalam pengertian investasi. Sedangkan kegiatan pembelian saham atau obligasi suatu perusahaan tidak termasuk dalam pengertian investasi ini.

Investasi khususnya investasi asing memang berperan sebagai *medium transfer* kebutuhan akan sumber daya seperti teknologi, kemampuan manajerial, jalur ekspor dan modal dari negara industri ke negara berkembang, oleh karena itu investasi akan meningkatkan produktivitas dan terkait pula dengan pertumbuhan ekonomi²⁸.

Investasi berperan penting dalam ekonomi makro yaitu mempengaruhi permintaan agregat²⁹. Selain itu investasi juga mempengaruhi siklus bisnis (*business cycle*) serta pembentukan modal (*capital accumulation*). Tingkat investasi yang tinggi akan menyebabkan pembentukan modal. Jadi investasi berfungsi ganda yakni terhadap pendapatan nasional (output) jangka pendek melalui permintaan agregat juga terhadap

²⁸ ML Jhinghan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003), hlm. 76.

²⁹ Paul Samuelson and William Nordhaus, *Op.Cit*, hlm. 187.

pertumbuhan pendapatan nasional jangka panjang melalui dampak pembentukan atas output potensial dan penawaran agregat.

Investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh motif pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*.

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu PMA (investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri) dan PMDN (investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri). Penanaman Modal Asing adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. PMA terdiri atas³⁰:

1. Investasi portofolio (*portfolio investment*), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.
2. Investasi asing langsung (*foreign direct investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara maju seperti Amerika Serikat, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik dan menghindari kelesuan

³⁰ Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), hlm. 109.

pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama untuk mencukupi kurangnya modal dalam negeri.

Untuk itu, berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak swasta baik luar negeri maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

Indikator Investasi Swasta terdapat dalam laporan Bank Indonesia yaitu besarnya kredit yang diberikan perbankan. Yang dimaksud kredit disini adalah berupa kredit investasi dan kredit modal kerja.

Tenaga Kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi³¹. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam angkatan kerja adalah

ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa : lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (*excess supply of labor*) dan lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (*excess for labor*).³²

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2³³ disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

³¹ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi. Jilid 1. Edisi 11*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013).

³² Sisdiyatmo Kusumowidho, *Dasar-Dasar Demografi Edisi 2*, (Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 2010), hlm. 38.

³³ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Indikator tenaga kerja adalah data tenaga kerja usia 15 tahun keatas. Data tersebut diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap periode.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini membahas pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah, investasi swasta dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Kajian Ekonomi Regional setiap provinsi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2011-2015, APBD provinsi di pulau Jawa tahun 2011-2015 dan informasi statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik selama kurun waktu penelitian. Pendekatan wawancara juga digunakan dalam penelitian ini dalam rangka klarifikasi terhadap data yang harus didalami.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada penelitian ini digunakan uji Kolmogorov – Smirnov untuk menguji normalitas data. Dari hasil uji normalitas diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,497 lebih besar dari 0,05,

sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Hasil uji heteroskedastisitas disimpulkan bahwa grafik plot terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol (0) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini digunakan nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel independen. Dari hasil uji multikolinieritas diperoleh hasil bahwa terdapat 2 (dua) variabel independen yaitu Pengeluaran Pemerintah (X_1) dan Investasi Pemerintah (X_2) yang memiliki nilai *tolerance* dibawah 0,10 dan VIF diatas 10. Dapat disimpulkan bahwa dalam

model terjadi multikolinieritas. Penulis selanjutnya melakukan pengujian model dengan mengeluarkan variabel Investasi Pemerintah, karena variabel tersebut memiliki nilai VIF yang lebih tinggi dari variabel Pengeluaran Pemerintah. Hasil yang diperoleh setelah mengeluarkan variabel Investasi Pemerintah dapat disimpulkan bahwa dari nilai tolerance maupun VIF tidak terjadi multikolinieritas dalam model, dimana semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10.

Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson. Hasil pengujian diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,748, dan selanjutnya dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson, dimana untuk jumlah sampel 30 dan variabel bebas 3 maka nilai tabelnya (du) 1,54. Oleh karena nilai Durbin Watson lebih besar daripada batas atas (du) 1,54 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil estimasi koefisien regresi yang diperoleh maka dapat dibentuk suatu persamaan regresi dengan model taksiran sebagai berikut:

$$Y = 3,995 + 0,261 X_1 + 0,293 X_3 + 0,470 X_4$$

Persamaan tersebut diatas mempunyai arti sebagai berikut :

1. Setiap peningkatan Pengeluaran Pemerintah (X_1) sebesar Rp.1 maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar Rp.0,261 apabila faktor-faktor lain dianggap konstan.
2. Setiap peningkatan Investasi Swasta (X_3) sebesar Rp.1 maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar Rp.0,293 apabila faktor-faktor lain dianggap konstan.
3. Setiap peningkatan Tenaga Kerja (X_4) sebesar 1 orang maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 0,470 apabila faktor-faktor lain dianggap konstan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di pulau Jawa

Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa untuk variabel Pengeluaran Pemerintah diperoleh nilai t sebesar 2,360 dengan signifikansi 0,026. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa terdapat pengaruh Pengeluaran

Pemerintah (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Pemda harus lebih memfokuskan pengeluaran ke sektor pengentasan kemiskinan dan pembangunan SDM di daerah-daerah yang masih tertinggal di pulau Jawa.

Fokus pemerintah pusat adalah bagaimana mendorong pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa agar pihak swasta mau berinvestasi ke luar pulau Jawa dan turut berperan serta dalam pembangunan.

Pengaruh Investasi Pemerintah (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di pulau Jawa

Variabel ini tidak dapat diuji lebih lanjut, karena pada saat dilakukan pengujian multikolinieritas terindikasi memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel Pengeluaran Pemerintah. Penulis memutuskan mengeluarkan variabel Investasi Pemerintah dari model penelitian.

Pengaruh Investasi Swasta (X_3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di pulau Jawa

Dari hasil pengujian diperoleh hasil untuk variabel Investasi Swasta diperoleh nilai t sebesar 7,892 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1

diterima, artinya bahwa terdapat pengaruh Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Fokus Pemda adalah menjaga iklim investasi di pulau Jawa agar tetap menarik bagi investor. Penegakan peraturan sesuai hukum yang berlaku menjadi fokus utama agar investor tetap bergairah dalam berinvestasi. Pemda juga harus fokus terhadap pembangunan infrastruktur yang bersifat publik untuk memperlancar arus distribusi.

Pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah pusat adalah bagaimana mendorong pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa agar menarik bagi swasta untuk berinvestasi bukan hanya membangun pabrik semata tetapi juga fokus kepada pemasaran di luar pulau Jawa. Pemberian ijin investasi jangan hanya diberikan kepada pemilik modal saja, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi juga harus bisa merasakan manfaatnya.

Pengaruh Tenaga Kerja (X_4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di pulau Jawa

Dari hasil pengujian diperoleh hasil untuk variabel Tenaga Kerja diperoleh nilai t sebesar 6,722 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa terdapat

pengaruh Tenaga Kerja (X_4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Tenaga kerja merupakan faktor yang paling dominan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa. Sebesar 60% penduduk Indonesia mendiami pulau Jawa.

Pemda hendaknya fokus pada kebijaksanaan bagaimana dapat mengembangkan *skill* pekerja agar sesuai dengan pekerjaan yang ditekuninya. Harus ada kebijakan menyeluruh mulai dari berapa jumlah industri di daerah itu, berapa jumlah kemampuan industri menyerap tenaga kerja sampai dengan bagaimana dunia pendidikan mampu menyediakan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan industri.

Bagi pemerintah pusat hal ini harus disikapi dengan mendorong investasi di luar Jawa agar terjadi pemerataan tenaga kerja.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di pulau Jawa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai F sebesar 278,292 dengan signifikansi 0,000. Dari hasil pengujian hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat

pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X_1), Investasi Swasta (X_3) dan Tenaga Kerja (X_4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Pemda hendaknya fokus untuk mempertahankan tenaga kerja, investasi swasta dan pengeluaran pemerintah agar motor penggerak perokonomian daerah bisa selalu berputar.

Bagi pemerintah pusat, hendaknya fokus untuk membangun di luar pulau Jawa dengan harapan terjadi kemandirian daerah sehingga pada saatnya nanti bisa mendorong tenaga kerja dan investasi ke luar pulau Jawa dan sekaligus memajukan daerah di luar Jawa sehingga pemerataan yang diharapkan benar-benar terjadi

Simpulan dan Saran

- a. Terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X_1) dengan Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Jawa sebesar 0,261. Ini berarti setiap peningkatan Pengeluaran Pemerintah (X_1) sebesar Rp.1 maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar Rp.0,261 apabila faktor-faktor lain dianggap konstan.
- b. Investasi Pemerintah (X_2) tidak dianalisis lebih lanjut karena pada saat pengolahan data pengujian multikolinieritas terindikasi memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel

Pengeluaran Pemerintah. Penulis memutuskan mengeluarkan variabel Investasi Pemerintah dari model penelitian.

- c. Terdapat pengaruh Investasi Swasta (X_3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Jawa. Setiap peningkatan Investasi Swasta (X_3) sebesar Rp.1 maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar Rp.0,293 apabila faktor-faktor lain dianggap konstan.
- d. Terdapat pengaruh Tenaga Kerja (X_4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Jawa. Artinya setiap peningkatan Tenaga Kerja (X_4) sebesar 1 orang maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 0,470 apabila faktor-faktor lain dianggap konstan.
- e. Terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa. Nilai R^2 sebesar 0,970 yang dapat ditafsirkan bahwa pengaruh dari seluruh variabel independen yaitu Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 97%. Artinya ketiga variabel ini memegang peranan secara bersama-

sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa sementara hanya 3% lainnya dijelaskan faktor-faktor lain.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah wajib mencari cara agar bisa melakukan pemerataan pembangunan. Caranya antara lain dalam pos pengeluaran APBD benar-benar fokus kepada kegiatan inti.
2. Pemerintah wajib menjaga iklim investasi swasta agar tetap bisa berputar.
3. Pemerintah wajib mendorong kemampuan tenaga kerja agar bisa mengembangkan keahliannya sesuai bidang yang ditekuni.

Daftar Pustaka

Buku

- Cushway, Barry (2002). *Human Resources Management*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Ferguson, Paul R. and Glenys J. Ferguson (1994). *Industrial Economics : Issues And Perspectives*, New York : New York University Press.
- Halim, Abdul (2010). *Akutansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jhinghan, M.L (2003). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Jogiyanto, Hartono (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE UGM, Yogyakarta.

Kementerian Keuangan RI. (2014). *Better Practice Guide Penganggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kusumowidho, Sisdjiatmo. (2010). *Dasar-Dasar Demografi Edisi 2*, Lembaga Demografi FEUI, Jakarta.

Rustiadi, Erman, dkk (2011). *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Salvatore, Dominick (2014). *Ekonomi Internasional*, Salemba Empat, Jakarta Hartley Keith (2011).

Samuelson, P ; Nordhaus, William D (2010). *Economics*, Mc Graw Hill, USA

Sandler Todd, Hartley Keith (2008) *Handbook of Defense Economics*, North-Holland, UK.

Sukirno, Sadono. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar*, PT Rajaiafindo Persada, Jakarta.

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. (2013). *Pembangunan Ekonomi. Jilid 1. Edisi 11*. Penerbit Erlangga.

Umar, Husein. (2002). *Research Methods in Finance And Banking*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yusgiantoro Purnomo (2014). *Ekonomi Pertahanan Teori dan Praktek*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Jurnal

Luntungan, A.Y. (2018). Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah*.

Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

.